

Judul : Aliran Uang E-KTP Ke Senayan Ditelusuri Lagi
Tanggal : Kamis, 28 Juni 2018
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 7

ALIRAN UANG E-KTP KE SENAYAN DITELUSURI LAGI

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mempercepat pelimpahan berkas perkara keponakan Setya Novanto.

Francisco Rosarians
francisco@tempo.co.id

JAKARTA — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mendalami dan menelusuri aliran uang proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP ke Parlemen, Senayan. Sejumlah saksi dari mantan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat kembali diperiksa untuk mengklarifikasi keterangan keponakan mantan Ketua DPR Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, yang diduga berperan sebagai pembagi jatah dan perantara fee ke anggota legislatif.

"Saya enggak terima uang. Saya sama sekali tak kenal tersangka (Irvanto)," kata mantan Ketua DPR, Marzuki Ali, sekuat pemeriksaan di gedung KPK kemarin.

Marzuki mengatakan penyidik melontarkan 17 pertanyaan tentang dugaan aliran uang proyek e-KTP ke Partai Demokrat. Pertanyaan tersebut didasarkan pada kesaksian Irvanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta tentang uang senilai US\$ 100 ribu ke politikus Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf. "Ketika itu saya bukan pengurus partai," kata Marzuki.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan penyidik memang tengah menelusuri aliran dana ke DPR untuk menuntaskan

berkas perkara Irvanto. Dia menilai pelimpahan berkas Irvanto harus selesai sebelum akhir masa penahanan, 6 Juli 2018. Dia pun tak menampik bahwa penyidik mengkonfirmasi sejumlah fakta yang muncul dalam persidangan. "Sekitar 115 saksi telah kami periksa," kata Febri. "Saksi lain masih terbuka kemungkinan sepanjang dibutuhkan dalam proses penyidikan."

KPK memang tengah menuntaskan penyidikan terhadap dua tersangka kasus e-KTP, Irvanto dan Made Oka Masagung. Keduanya diduga berperan sebagai perantara dan penampung suap kepada anggota DPR. Bahkan Irvanto—kalah itu menjabat Direktur Utama PT Murakabi Sejahtera yang turut dalam konsorsium proyek KTP elektronik—diduga turut mengatur pembagian fee proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

Dalam persidangan, Irvanto mengaku menjadi kurir uang suap kepada sejumlah anggota DPR, yaitu Nurhayati senilai US\$ 100 ribu; mantan Ketua Komisi Pemerintahan DPR Chairuman Harahap US\$ 1,5 juta; mantan anggota Badan Anggaran DPR Melchias Markus Mekeng US\$ 1 juta, dan Agun Gunandjar US\$ 1,5 juta; serta politikus Demokrat Jafar Hafsa US\$ 100 ribu. "Perintah Andi Narogong (alias Andi Agustinus, pengusaha yang jadi terpidana

Nyanyian Sang Keponakan

PROSES hukum terhadap keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, menguak dugaan aliran duit dari proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP. Mantan Direktur Utama PT Murakabi Sejahtera ini juga telah mengajukan permohonan menjadi *justice collaborator* dengan janji mengungkap seluruh nama anggota Parlemen Senayan yang menerima uang dari proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

Peran:

- Membentuk konsorsium PT Murakabi Sejahtera yang ikut tender proyek KTP elektronik.
- Ikut dalam pembahasan korupsi proyek KTP elektronik bersama tim Fatmawati.
- Mengetahui jatah pembagian fee proyek.
- Mengantar jatah uang ke sejumlah politikus Senayan.
- Menampung uang untuk Setya senilai US\$ 3,5 juta dari PT Biomorf Mauritius melalui perusahaan penukaran uang di Singapura.

Jabatan:
Direktur Utama
PT Murakabi
Sejahtera



kasus e-KTP). Saya dijanjikan uang," kata Irvanto.

Agun dan Mekeng membantah telah menerima uang proyek e-KTP. Hal yang sama juga diungkapkan sejumlah politikus Senayan saat menjadi saksi di KPK, yaitu anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Khatibul Umam Wiranu; serta mantan Wakil Ketua Banggar, Mirwan Amir dan Oily Dondokambey. "Saya tidak kenal dua orang itu.

Jadi, bagaimana saya bisa kasih keterangan?" kata Mekeng.

Sedangkan Nurhayati menilai Irvanto telah melontarkan fitnah dan berhalusinasi tentang pemberian uang US\$ 100 ribu. "Saat proyek e-KTP diprogramkan, saya ada di Komisi Pertahanan DPR. Saya juga belum dan tidak mengenal Setya Novanto saat itu secara langsung," kata dia. ● ANDITA RAHMA I. MARYA AYU

"Saya tak terkait (e-KTP)."

JAFAR HAFSAH

"Enggak ada itu (terima uang dari Irvanto)."

MARKUS NARI

"Saya enggak pernah terima (suap dari proyek e-KTP)."

CHAIRUMAN HARAHAP

TEKS: FRANCISCO ROSARIANS
FOTO: TEMPO/IMAM SUKAMTO

Dugaan penerima uang:

- Politikus Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, senilai US\$ 100 ribu
- Ketua Komisi Pemerintahan DPR Chairuman Harahap senilai US\$ 1,5 juta
- Ketua Badan Anggaran Melchias Markus Mekeng sebesar US\$ 1,5 juta
- Pimpinan Komisi Pemerintahan Agun Gunandjar senilai US\$ 1 juta
- Politikus Demokrat, Jafar Hafsa, sebesar US\$ 100 ribu
- Politikus Partai Golkar, Markus Nari, senilai Rp 1 juta